

**Dinas**

**Dagkop-Prinum**

**Lutim**

**RENCANA KERJA**

**(RENJA)**

**Tahun 2025**

**Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian**

**Kabupaten Luwu Timur**

**Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321423 Fax (o474) 321423**



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Soekarno Hatta, No Telp (0474) 321423, Fax (0474) 321423

**Malili ,92981**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor …. Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor ……);
4. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ….. Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor ….. );
5. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab bertugas :
2. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
3. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun; dan
4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
5. Ketua bertugas :
6. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun;
7. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan danpetunjuk kepada tim penyusun;
8. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tim penyusun kepada penanggung jawab; dan
9. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
10. Sekretaris bertugas :
11. Menyusun dokumen Renja Tahun 2025 dan Perubahan Renja tahun 2025;
12. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
13. Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2025; dan
14. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
15. Anggota bertugas :
16. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah;
17. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan;
18. Melakukan telaahan terhadap isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
19. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
20. Merumuskan tujuan, sasaran program dan kegiatan Tahun 2024;
21. Menyesuaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 yang telah ditetapkan; dan
22. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal Juni 2024

**KEPALA DINAS,**

**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP:19751001 199612 1 001

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | Halaman |
| KATA PENGANTAR .............…………………….............……………………………….............  DAFTAR ISI ………........……………............……………………………………………….............  daftar tabel ...........…........………………………………………………………….............. | | | | | | i  ii  iii |
| BAB I | PENDAHULUAN .............………………...........…………………………………… | | | | | 1 |
|  | 1.1 Latar Belakang ………………...............……………...........................  1.2 Landasan Hukum ...…………………………...................................  1.3 Maksud dan Tujuan……........................……...............................  1.4 Sistematika Penulisan............................................................... | | | | | 1 |
| 5 |
| 7  8 |
| BAB II | HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU............. | | | | | 9 |
|  | 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah………………………………………….  2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.............................. | | | | | 9  17 |
|  | 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....................................................................................  2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................................  2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat............... | | | | | 19  27  44 |
|  | |
| BAB III | TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..................................... | | | | | 47 |
|  | 3.1 Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional/Propinsi………...................  3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah............................  3.3 Program dan Kegiatan.............................................................. | | | | | 47  50  52 |
|  |  | | | | |  |
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH………….. | | | | | 58 |
| BAB V | PENUTUP………………………………………………………………………… | | | | | 66 |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Tabel 2 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Tabel 4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Tabel 5 : Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Tabel 6 : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas izin-Nyalah semata kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

Sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 dan Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 21 ayat 3, bahwa Renja-SKPD dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada rancangan awal RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program, dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini berisi tentang prioritas program dan indikasi kegiatan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian serta indikasi pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak untuk terselenggaranya perbaikan kinerja manajemen (performance planning) pemerintahan.

Malili, Juni 2024

**KEPALA DINAS,**

**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP:19751001 199612 1 001

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, RENJA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RENJA PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan perangkat daerah untuk merumuskan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

RENJA PERANGKAT DAERAH merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Mengingat arti strategis dokumen RENJA PERANGKAT DAERAH dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan RENJA PERANGKAT DAERAH harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sementara itu terdapat prinsip-prinsip didalam penyusunan RENJA yang tidak terlepas dalam tahapan proses penyusunan RENJA yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada RENSTRA SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Penyusunan RENJA PERANGKAT DAERAH bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

3. Substansi RENJA PERANGKAT DAERAH memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan PERANGKAT DAERAH terhadap RENSTRA SKPD, evaluasi pelaksanaan RENJA PERANGKAT DAERAH tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.

4. Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).

5. Rumusan program/kegiatan di dalam RENJA PERANGKAT DAERAH didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah.

6. Progaram/kegiatan dalam RKPD provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya. Sedangkan untuk RKPD kabupaten/kota dirinci menurut sumber dana APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN dan sumber lainnya.

7. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana baik untuk tahun n dan tahun n + 1.

Mengacu pada prinsip-prinsip tersebut diatas, maka Penyusunan RENJA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 juga berpedoman pada Visi dan Misi Presiden RI 2019-2024 dimana visi : “Bersama Idonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan misi “ (1) Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi,air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkwalitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, (4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, (5) Melanjutkan hirilisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021– 2026.

Bagan alur penyusunan RENJA OPD adalah sebagai berikut :



PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PD

PENETAPAN RENJA PD

**1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun Anggaran 2025 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2029 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RENJA PERANGKAT DAERAH adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan program dan kegiatan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ke dalam program/kegiatan tahunan;

2. Menyiapkan acuan bagi RAPBD;

3. Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja program/kegiatan tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA PERANGKAT DAERAH adalah agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN,** Bab inimemuat tentang gambaran umum, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.

**BAB II** **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**, Bab ini memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran renstra serta program dan kegiatan yang direncanakan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, Bab ini memuat tentang rencana kerja yang telah dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan serta pendanaan yang dibutuhkan.

**BAB V PENUTUP**, Bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

* 1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat pada laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

RKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Adapun penyusunan untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi capaian tahun sebelumnya. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur s/d Tahun berjalan(\*) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tabel. 2.1**  **(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)**  **Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  **Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Nama Perangkat Daerah :** | | | | | | **Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | **Kode** | | | | | **Urusan/**  **Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/**  **Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome)/**  **Kegiatan (Output)** | **Target Kinerja Capaian Progran (Renstra SKPD Tahun 2026)** | | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (tahun n-3)** | | | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2023 (tahun lalu/n-2)** | | | | | | | | | **Target Program/**  **Kegiatan Renja SKPD tahun berjalan 2024 (tahun n-1)** | | | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2024 (tahun berjalan/n-1)** | | | | | | | | | **Target Renja SKPD 2023**  **(n-2)** | | | **Realisasi Renja SKPD 2023**  **(n-2)** | | | **Tingkat Realisasi (%)** | | | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan/n-1)** | | | **Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2024 (%)** | | | | | ***1*** | | | | | ***2*** | ***3*** | ***4*** | | ***5*** | | | ***6*** | | | ***7*** | | | ***8=7/6*** | | | ***9*** | | | ***10=5+7+9*** | | | ***11=10/4*** | | | | | **2** |  |  |  |  | **WAJIB** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | | | **2** | **17** |  |  |  | **KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | | | | **2** | **17** | **01** |  |  | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar** | **97** | **%** | | **103,51** | **%** | | **95** | % | | **98,43** | **%** | | **103,61** | **%** | | **97** | **%** | | **100,41** | **%** | | **105,68%** |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 13 | dokumen | | 3 | dokumen | | 3 | dokumen | | 3 | dokumen | | 100 | % | | 3 | dokumen | | 9 | dokumen | | 69,23% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 10 | dokumen | | 2 | dokumen | | 2 | dokumen | | 2 | dokumen | | 100 | % | | 2 | dokumen | | 6 | dokumen | | 60% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 10 | dokumen | | 2 | dokumen | | 2 | dokumen | | 2 | dokumen | | 100 | % | | 2 | dokumen | | 6 | dokumen | | 60% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 50 | Laporan | | 10 | Laporan | | 10 | laporan | | 10 | laporan | | 100 | % | | 10 | laporan | | 30 | laporan | | 60% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  | % | | | | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 28 | orang | | 26 | orang | | 27 | orang | | 27 | orang | | 100 | % | | 28 | orang | | 28 | orang | | 96,43% |  | % | | | | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/  Bulanan/  Triwulanan/  Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/  triwulanan/  semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD | 90 | laporan | | 18 | laporan | | 18 | laporan | | 18 | laporan | | 100 | % | | 18 | laporan | | 45 | laporan | | 50% |  | % | | | | 2 | 17 | 01 | 2.03 |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  | % | | | | 2 | 17 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 10 | laporan | | 2 | laporan | | 2 | laporan | | 2 | laporan | | 100 | % | | 2 | laporan | | 6 | laporan | | 60% |  | % | | | | 2 | 17 | 01 | 2.04 |  | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 98,43% |  | | 98,43% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah | 5 | dokumen | | 4 | dokumen | | 4 | dokumen | | 4 | dokumen | | 100 | % | | 1 | dokumen | | 9 | dokumen | | 180% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian | 60 | dokumen | | 12 | dokumen | | 12 | dokumen | | 12 | dokumen | | 100 | % | | 12 | dokumen | | 30 | dokumen | | 60% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 14 | orang | | 2 | orang | | 3 | orang | | 3 | orang | | 100 | % | | 4 | orang | | 9 | orang | | 64,28% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 10 | orang | | 14 | orang | | 10 | orang | | 10 | orang | | 100 | % | | 5 | orang | | 25 | orang | | 250% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum PD | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 50 | paket | | 10 | paket | | 10 | paket | | 10 | paket | | 100 | % | | 11 | paket | | 31 | paket | | 62% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 105 | paket | | 14 | paket | | 10 | paket | | 10 | paket | | 100 | % | | 4 | paket | | 26 | paket | | 24,76% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | 3 | paket | | 2 | paket | | - | paket | | - | paket | | - | % | | 4 | paket | | 4 | paket | | 133,33% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 140 | paket | | 26 | paket | | 20 | paket | | 20 | paket | | 100 | % | | 20 | paket | | 60 | paket | | 42,85% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan | 15 | paket | | 3 | paket | | 3 | paket | | 3 | paket | | 100 | % | | 3 | paket | | 9 | paket | | 60% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 300 | dokumen | | 60 | dokumen | | 60 | dokumen | | 60 | dokumen | | 100 | % | | 60 | dokumen | | 180 | dokumen | | 60% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | 1000 | laporan | | 277 | laporan | | 320 | laporan | | 110 | laporan | | 34,37 | % | | 4 | laporan | | 434 | laporan | | 43,40% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 1140 | laporan | | 539 | laporan | | 211 | laporan | | 211 | laporan | | 100 | % | | 320 | laporan | | 742 | laporan | | 65,09% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 215 | dokumen | | 50 | dokumen | | 50 | dokumen | | 50 | dokumen | | 100 | % | | 50 | dokumen | | 150 | dokumen | | 69,77% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.07 |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan | 14 | unit | | 4 | unit | | 54 | unit | | 54 | unit | | 100 | % | | 5 | unit | | 63 | unit | | 450% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan | 10 | unit | | 4 | unit | | 7 | unit | | 7 | unit | | 100 | % | | 4 | unit | | 15 | unit | | 150% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.08 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | 9 | unit | |  | - | | 1 | unit | | 1 | unit | | 100 | % | | 2 | unit | | 3 | unit | | 33,33% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 7500 | laporan | | 1518 | laporan | | 1500 | laporan | | 1500 | laporan | | 100 | % | | 1500 | laporan | | 4251 | laporan | | 56,68% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 5 | laporan | | 5 | laporan | | 5 | laporan | | 5 | laporan | | 100 | % | | 4 | laporan | | 4 | laporan | | 100% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan | 5 | laporan | | 4 | laporan | | 4 | laporan | | 4 | laporan | | 100 | % | | 4 | laporan | | 4 | laporan | | 80% |  |  | | | | 2 | 17 | 01 | 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik | 100 | % | | 100 | -% | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100% |  |  | | | | 2 | **17** | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya | 10 | unit | | 10 | unit | | 10 | unit | | 10 | unit | | 100 | % | | 10 | unit | | 10 | unit | | 100% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 54 | unit | | 44 | unit | | 54 | unit | | 54 | unit | | 79,07 | % | | 45 | unit | | 54 | unit | | 100% |  | % | | | | 2 | **17** | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/  direhabilitasi | 3 | unit | | 1 | unit | | 3 | unit | | 3 | Unit1 | | 150 | % | | 1 | unit | | 3 | unit | | 100% |  |  | | | | **2** | **17** | **02** |  |  | **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam** | **Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam** | 14,72 | % | | 7,24 | % | | 6 | % | | 6 | % | | 100 | % | | 12,65 | % | | 13,24 | % | | 89,94% |  |  | | | | 2 | **17** | 02 | **2.02** |  | Penertiban Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi | 13,41 | % | | 5,79 | % | | - | % | | - | % | | - | % | | 10,22 | % | | 5,79 | % | | 43,18% |  | % | | | | 2 | **17** | 02 | **2.02** | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasisimpan pinjam untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 120 | Unit usaha | | 20 | Unit usaha | | - unit usaha | % | | -unit usaha | % | | - | % | | 20 | Unit usaha | | 20 | Unit usaha | | 16,67% |  |  | | | | **2** | **17** | **03** |  |  | **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** | **Persentase koperasi yang berkualitas** | 36,13 | % | | 31,88 | % | | 32,63 | % | | 32,94 | % | | 100,95 | % | | 34,34 | % | | 32,45 | % | | 89,81% |  |  | | | | 2 | **17** | 03 | 2.01 |  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota | 90,20 | % | | 79,06 | % | | 75,70 | % | | 84,39 | % | | 111,48 | % | | 82,15 | % | | 62 | % | | 68,74% |  | % | | | | 2 | **17** | 03 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan | 166 | Unit usaha | | 136 | Unit usaha | | 146 | Unit usaha | | 146 | Unit usaha | | 100 | % | | 156 | Unit usaha | | 146 | Unit usaha | | 87,95% |  | % | | | | **2** | **17** | **04** |  |  | **Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi** | **Persentase koperasi sehat** | 35,75 | % | | 31,88 | % | | 32,80 | % | | 33,82 | % | | 103,11 | % | | 34,34 | % | | 32,21 | % | | 90,09% |  |  | | | | 2 | 17 | 04 | 2.01 |  | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase usaha simpan pinjam dari koperasi yang dinilai kesehatannya | 55,81 | % | | 59,30 | % | | 51,62 | % | | 54,41 | % | | 105,40 | % | | 54,52 | % | | 52,91 | % | | 98,39% |  |  | | | | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan | 240 | Unit usaha | | 15 | Unit usaha | | 15 | Unit usaha | | 15 | Unit usaha | | 100 | % | | 15 | Unit usaha | | 45 | Unit usaha | | 18,75% |  | % | | | | **2** | **17** | **05** |  |  | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** | **Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan** | 15,61 | % | | 11,27 | % | | 12,18 | % | | 113,43 | % | | 110,26 | % | | 14,12 | % | | 46,27 | % | | 86,03% |  | % | | | | 2 | 17 | 05 | 2.01 |  | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota | 40,93 | % | | 18,80 | % | | 25,31 | % | | 26,11 | % | | 103,16 | % | | 33,51 | % | | 26,11 | % | | 63,79% |  | % | | | | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian | 75 | orang | | 15 | orang | | 10 | orang | | 10 | orang | | 100 | % | | 30 | orang | | 55 | orang | | 73,33% |  | % | | | | **2** | **17** | **06** |  |  | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** | **Persentase peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi** | 6,75 | % | | 4,51 | % | | 4,90 | % | | 5,15 | % | | 105,10 | % | | 5,64 | % | | 4,85 | % | | 71,85% |  | % | | | | 2 | 17 | 06 | 2.01 |  | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Ynag Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha | 6,75 | % | | 3,75 | % | | 3,65 | % | | 4,41 | % | | 120,82 | % | | 5,64 | % | | 4,08 | % | | 60,44% |  |  | | | | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 01 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha yang produktif bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha | 84 | Unit usaha | | 20 | Unit usaha | | 20 | Unit usaha | | 20 | Unit usaha | | 100 | % | | 20 | Unit usaha | | 20 | Unit usaha | | 71,43% |  | % | | | | **2** | **17** | **07** |  |  | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** | **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha** | 60 | % | | 40,85 | % | | 45 | % | | 45,57 | % | | 101,27 | % | | 50 | % | | 45,57 | % | | 75,95% |  |  | | | | 2 | 17 | 07 | 2.01 |  | Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah wirausaha baru berskala mikro | 168 | WUB | | 93 | WUB | | 108 | WUB | | 116 | WUB | | 107,47 | % | | 125 | WUB | | 240 | WUB | | 142,86% |  | % | | | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 02 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro | 100 | Unit usaha | | 50 | Unit usaha | | 120 | Unit usaha | | 120 | Unit usaha | | 100 | % | | 60 | Unit usaha | | 230 | Unit usaha | | 230% |  |  | | | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 03 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan | 200 | Unit usaha | | 45 | Unit usaha | | 40 | Unit usaha | | 40 | Unit usaha | | 100 | % | | 45 | Unit usaha | | 45 | Unit usaha | | 65% |  |  | | | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 04 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro dan kecil yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro | 350 | Unit usaha | | 75 | Unit usaha | | 120 | Unit usaha | | 120 | Unit usaha | | 100 | % | | 70 | Unit usaha | | 231 | Unit usaha | | 66% |  |  | | | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro | 105 | orang | | 89 | orang | | 90 | orang | | 90 | orang | | 100 | % | | 95 | orang | | 274 | orang | | 260,95% |  |  | | | | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 14 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah unit usaha Mikro Terdata | 1266 | Unit usaha | | 229 | Unit usaha | | 241 | Unit usaha | | 241 | Unit usaha | | 100 | % | | 258 | Unit usaha | | 528 | Unit usaha | | 41,71% |  |  | | | | **2** | **17** | **08** |  |  | **Program Pengembangan UMKM** | **Rasio pertumbuhan skala usaha mikro** | 8,16 | % | | 2,87 | % | | 3,89 | % | | 4,12 | % | | 105,80 | % | | 5,19 | % | | 4,06 | % | | 49,75% |  | % | | | | 2 | 17 | 08 | 2.01 |  | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Persentase peningkatan skala usaha mikro | 8,30 | % | | 7,42 | % | | 7,05 | % | | 7,06 | % | | 100,13 | % | | 7,36 | % | | 7,28% |  | | 87,71% |  | % | | | | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain Teknologi | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi | 90 | Unit usaha | | 59 | Unit usaha | | 17 | Unit usaha | | 17 | Unit usaha | | 100 | % | | 12 | Unit usaha | | 82 | Unit usaha | | 84,44% |  | % | | | |  |  |  |  |  | **PILIHAN** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | % | | | |  |  |  |  |  | **PERDAGANGAN** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | % | | | | **3** | **30** | **03** |  |  | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun  /direvitalisasi | 10 | % | | 8,56 | % | | 10 | % | | 9,68 | % | | 96,80 | % | | 10 | % | | 9,41 | % | | 94,10% | | % | | | | 3 | 30 | 03 | 2.01 |  | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan | 25 | unit | | 6 | unit | | 9 | unit | | 9 | unit | | 100 | % | | 1 | unit | | 20 | unit | | 76% |  | % | | | | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 01 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan | 25 | unit | | 6 | unit | | 9 | unit | | 9 | unit | | 100 | % | | 4 | unit | | 19 | unit | | 76% |  | % | | | | 3 | 30 | 03 | 2.02 |  | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan | 70 | % | | 100 | % | | 70 | % | | 81,64 | % | | 116,63 | % | | 70 | % | | 70 | % | | 100% |  | % | | | | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 01 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelolah sarana distribusi perdagangan | 37 | dokumen | | 5 | dokumen | | 4 | dokumen | | 4 | dokumen | | 100 | % | | 1 | dokumen | | 10 | dokumen | | 27,02% |  | % | | | | **3** | **30** | **04** |  |  | **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting** | **Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok** | 7,86 | % | | 6,84 | % | | 8 | % | | 2,76 | % | | 34,50 | % | | 7,80 | % | | 5,80 | % | | 73,79% |  | % | | | | 3 | **30** | 04 | 2.02 |  | Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Persentase harga barang kebtutuhan pokok dan barang penting yang terkendali | 44 | % | | 48,71 | % | | 44 | % | | 48,71 | % | | 110,70 | % | | 44 | % | | 47,14 | % | | 107,14% |  | % | | | | 3 | **30** | 04 | 2.02 | 02 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan | 1300 | laporan | | 249 | laporan | | 260 | laporan | | 243 | laporan | | 93,46 | % | | 12 | Laporan | | 498 | laporan | | 38,31% |  | % | | | | 3 | **30** | 04 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota | 10400 | laporan | | 1680 | laporan | | 2000 | laporan | | 2000 | laporan | | 100 | % | | 11 | laporan | | 3686 | laporan | | 35,44% |  |  | | | | 3 | **30** | 04 | 2.03 |  | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Dearah Kabupaten/Kota | Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsididan pestisida | 100 | % | | 99,90 | % | | 100 | % | | 91,67 | % | | 91,67 | % | | 100 | % | | 97,19 | % | | 97,19% |  |  | | | | 3 | **03** | 04 | 2.03 | 03 | Pengawasan Penyaluran dan Pengunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% | 420 | laporan | | 84 | laporan | | 60 | laporan | | 60 | laporan | | 100 | % | | 60 | laporan | | 174 | laporan | | 41,43% |  |  | | | | **3** | **30** | **05** |  |  | **Program Pengembangan Ekspor** | **Persentase peningkatan nilai ekspor** | 15 | % | | 16,14 | % | | 15 | % | | 16,06 | % | | 107,07 | % | | 15 | % | | 15,73 | % | | 104,87% |  |  | | | | 3 | **30** | 05 | 2.01 |  | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota | Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi -dagang | 60 | % | | 40 | % | | 40 | % | | 40 | % | | 100 | % | | 40 | % | | 40 | % | | 100% |  | % | | | | 3 | **30** | 05 | 2.01 | 02 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang | 5 | Pelaku usaha | | 1 | Pelaku usaha | | 1 | Pelaku usaha | | 1 | Pelaku usaha | | 100 | % | | 5 | Pelaku usaha | | 1 | Pelaku usaha | | 40% |  | % | | | | 3 | **30** | 05 | 2.01 | 03 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal | 1140 | Pelaku usaha | | 226 | Pelaku usaha | | 231 | Pelaku usaha | | 231 | Pelaku usaha | | 100 | % | | 5 | Pelaku usaha | | 457 | Pelaku usaha | | 40,09% |  |  | | | | 3 | **30** | 05 | 2.01 | 04 | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan | 5 | Pelaku usaha | | 1 | Pelaku usaha | | 5 | Pelaku usaha | | 5 | Pelaku usaha | | 100 | % | | 5 | Pelaku usaha | | 5 | produk | | 100% |  |  | | | | 3 | **30** | 05 | 2.01 | 05 | Pemingkatan citra produk eksporEkspor | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi | 125 | Produk | | 5 | produk | | 5 | Produk | | 5 | Produk | | 100 | % | | 5 | Produk | | 10 | Produk | | 8% |  |  | | | | **3** | **30** | **06** |  |  | **Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen** | **Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP** | 5 | % | | 2,33 | % | | 5 | % | | 3,81 | % | | 76,20 | % | | 5 | % | | 3,71 | % | | 74,2% |  |  | | | | 3 | **30** | 06 | 2.01 |  | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berpa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan | Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi | 75 | % | | 69,87 | % | | 60 | % | | 59,35 | % | | 98,92 | % | | 70 | % | | 66,41 | % | | 88,55% | | % | | | | 3 | **30** | 06 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan ditera ulang | 4725 | unit | | 800 | unit | | 915 | unit | | 888 | unit | | 97,05 | % | | 945 | unit | | 2.273 | unit | | 48,10% | |  | | | |  |  |  |  |  | **PERINDUSTRIAN** |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | | | **3** | **31** | **02** |  |  | **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri** | **Jumlah peratutan Bupati (Perbup) Kawasan industry yang ditetapkan** | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 0 | dokumen | | 1 | dokumen | | 100 | % | | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 100% |  |  | | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 |  | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industry yang dievaluasi | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 100 | % | | - | dokumen | | 1 | dokumen | | 100% |  |  | | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupate/Kota | Jumlah dokumen rencana pembangunan industri | 55 | dokumen | | 20 | dokumen | | 20 | dokumen | | 20 | dokumen | | 100 | % | | 1 | dokumen | | 41 | dokumen | | 74,54% |  |  | | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 03 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 100 | % | | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 100% |  |  | | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 05 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat | 100 | dokumen | | 25 | dokumen | | 58 | dokumen | | 60 | dokumen | | 103,49 | % | | 20 | dokumen | | 105 | dokumen | | 105% |  |  | | | | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 06 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah IKM dalam sentra kawasan industri yang dibina dan dikembangkan | 80 | IKM | |  | - | | - | IKM | | - | IKM | | - | % | | - | - | | - | - | | 0% |  |  | | | | **3** | **31** | **03** |  |  | **Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota** | **Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** | 92,30 | % | |  | - | | 0 | % | | 0 | % | | 0 | % | | 91,66 | % | | 91,66 | % | | 100% |  |  | | | | 3 | 31 | 03 | 2.01 |  | Penertiban Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Mawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) | Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali | 59,09 | % | |  | - | | 0 | % | | 0 | % | | 0 | % | | 54,54 | % | | 53,85 | % | | 98,73% |  |  | | | | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah idokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan dibidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten/kota | 245 | dokumen | |  | dokumen | | 0 | dokumen | | 0 | dokumen | | 0 | % | | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 0,41% |  |  | | | | **3** | **31** | **04** |  |  | **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional** | **Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar** | 37 | % | | 7,04 | % | | 7 | % | | 6,86 | % | | 98 | % | | 10 | % | | 7,97 | % | | 21,54% |  |  | | | | 3 | 31 | 04 | 2.01 |  | Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional (SIINas) | 60 | % | | 50 | % | | 50 | % | | 50 | % | | 100 | % | | 50 | % | | 50 | % | | 83,33% |  |  | | | | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 01 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Nasional (SINAS) | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengelolaan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) | 5 | dokumen | | 1 | dokumen | | 5 | dokumen | | 5 | dokumen | | 100 | % | | 1 | dokumen | | 7 | dokumen | | 140% |  |  | | | | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 03 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupate/kota dalam penyampaian data ke SIINas | 0 | dokumen | | 0 | dokumen | | 0 | dokumen | | 0 | dokumen | | % |  | | 1 | dokumen | | 1 | dokumen | | 100% |  |  | | | |

* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan PP nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 06 tahun 2008.

Keberhasilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel. 2.2 (Tabel. T-C.30) berikut ini :

**Tabel 2.2**

**(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

**Kabupaten Luwu Timur**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator\*)** | **SPM/ Standar Nasional** | **IKK (PP-6/08)** | **Target Rensta Perangkat Daerah** | | | | **Realisasi Capaian** | | **Proyeksi** | | **Catatan Analisa** |
| **Tahun 2022**  **(thn n -2)** | **Tahun 2023**  **(thn n-1)** | **Tahun 2024**  **(thn n)** | **Tahun 2025**  **(thn n+1)** | **Tahun 2022**  **(thn n-2)** | **Tahun 2023**  **(thn n-1)** | **Tahun 2024**  **(thn n)** | **Tahun 2025**  **(thn n + 1)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** | **(10)** | **(11)** | **(12)** | **(13)** |
|  | **IKK** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Persentase Koperasi Aktif |  |  | 77,10% | 78,15% | 79,12% | 80,00% | 77,32% | 79,19% | 79,12% | 80,00% |  |
|  | Jumlah UKM non BPR/LKM UKM |  |  |  |  |  |  | 25,725 UKM | 26,101 UKM | 26.101  UKM | 26.101  UKM |  |
|  | Usaha Mikro dan Kecil |  |  |  |  |  |  | 25,701 UKM | 26,101 UKM | 26.101 | 26.101 |  |
|  | Jumlah BPR/LKM |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
|  | Kontribusi perdagangan terhadap PDRB |  |  |  |  |  |  | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 3,79% |  |
|  | Cakupan binaan kelompok pedagang/  usaha informal |  |  |  |  |  |  | 59,17% | 68,07% | 68,07% | 68,07% |  |
|  | Ekspor perdagangan bersih |  |  |  |  |  |  | 1.251.398.446,76$ | 1.313.160.356,70$ | 1.313.160.356,70 $ |  |  |
|  | **Indikator Kinerja Utama** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun |  |  | 95% | 95% | 97% | 98% | 105,45% | 109,77% | 97% | 98% |  |
|  | Pertumbuhan nilai produksi IKM |  |  | 0,10% | 0,12% | 0,13% | 0,15% | 0,112% | 0,125% | 0,13% | 0,15% |  |
|  | Pertumbuhan nilai produksi UMKM |  |  | 7,55% | 78,77% | 9,68% | 10,29% | 8,20% | 8,78% | 9,68% | 10,29% |  |
|  | Pertumbuhan sub sektor perdagangan |  |  | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 38,32% | 6,58% | 12,5% | 12,5% |  |

Target dan Realisasi Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan PerindustrianTahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Misi/Perangkat Daerah/Urusan | Indikator | Satuan | Tahun 2024 | | |
| Target | Realisasi | Capaian |
|  | Misi II |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Persentase koperasi yang berkualitas | % | 34,44 | 32,94 | 95,64 |
|  | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Persentase koperasi sehat | % | 34,34 | 33,82 | 98,48 |
|  | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan | % | 14,12 | 13,43 | 95,11 |
|  | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi | % | 5,64 | 5,15 | 91,31 |
|  | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | % | 50 | 45,57 | 91,14 |
|  | Program Pengembangan UMKM | Rasio pertumbuhan skala usaha mikro | % | 5,19 | 4,12 | 79,38 |
|  | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/  Direvitalisasi | % | 10 | 9,68 | 96,80 |
|  | Program Pengembangan Ekspor | Persentase peningkatan nilai ekspor | % | 15 | 16,06 | 107,07 |
|  | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | % | 7,80 | 4,76 | 61,02 |
|  | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP | % | 5 | 3,81 | 76,2 |
|  | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Jumlah peraturan Bupati (Perbub) kawasan industri yang ditetapkan | dokumen | 1 | 1 | 100 |
|  | Misi IV |  |  |  |  |  |
|  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | % | 98 | 98,43 | 100,44 |
|  | Program Pelayanan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar | % | 10 | 6,86 | 68,6 |

**Tabel. 2.3**

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran**

**Tahun 2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **Capaian%** |
| 1. | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun | 97% | 110,26% | 113,67% |
| 2. | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM | * Pertumbuhan nilai produksi IKM * Pertumbuhan nilai produksi UMKM * Persentase koperasi aktif * Pertumbuhan sub sektor perdagangan | * 0,13% * 9,68% * 79,12% * 12,50% | * 0,125% * 8,78% * 79,19% * 0,19% | 96,15%  90,70%  100,09%  1,52% |
| 3. | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah | 98% | 98,43% | 100,44% |

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 258 tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan; pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana dan kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan dan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di kabupaten Luwu Timur.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang perlu dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian terlihat dari pemetaan permasalahan seperti tabel di bawah ini :

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

**Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :**

1. Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan sarana dan prasarana dan SDM.
2. Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas.
3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.
4. Sistem pengelolaan usaha ritel yang merajalela yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.
5. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM.
6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
7. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.

**Bidang Perdagangan :**

1. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah
2. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi
3. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki
4. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan ekspor dan impor

**Bidang Perindustrian :**

1. Masih rendahnya produktifitas IKM
2. Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM
3. Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk IKM
4. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaku IKM
   1. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sebagaimana program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dengan memperhatikan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan analisa kebutuhan masyarakat pada kegiatan Musrenbang. Selain itu, review ini juga didasari atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sehingga membutuhkan penyesuaian sebagai upaya sinergitas. Rancangan awal RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Tabel. 2.4** | | | | | | | | | | |
|  | |  | | (Tabel T-C. 31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) | | | | | | | | | | |
|  | |  | | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | **Kabupaten Luwu Timur** | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | OPD : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | | | |
| **NO** | | **Rancangan Awal RKPD** | | | | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | | | **Catatan Penting** |
| **Program/Kegiatan**  **/Sub Kegiatan** | | | | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana** | **Program/ Kegiatan/**  **Sub Kegiatan** | | **Indikator Kinerja** | **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana** | |
| **I** | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | | | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar** |  | 98% | **4.819.244.497** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar** |  | 100% | **5.123.244.497** | |  |
| **1** | | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **86.031.800** | **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **136,951,800** | |  |
|  | | **-** | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah |  | 10 Laporan | 33.881.300 | **-** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah |  | 10 Laporan | 33.881.300 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  | 2 dokumen | 3.112.300 | **-** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  | 2 dokumen | 3,112,300 | |  |
|  | |  | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 3 dokumen | 45.928.200 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 3 dokumen | 95.928.200 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | Jumlah dokumen DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  | 2 dokumen | 3.110.000 | **-** | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  | 2 dokumen | 3,110,000 | |  |
| **2** | | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **3.830.880.077** | **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **3.830.880.077** | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD |  | 18 laporan | 115.521.800 | **-** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD |  | 18 laporan | 115,521,800 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 28 orang/bulan | 3.715.358.277 | **-** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 28 orang/bulan | 3.715.358.277 | |  |
| **3** | | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | | | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **35.525.000** | **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **35.525.000** | |  |
|  | | **-** | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD |  | 2 laporan | 35.525.000 | **-** | Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD |  | 2 laporan | 35.525.000 | |  |
| **4** | | **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | | | **Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **8.524.000** | **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | **Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **8,524,000** | |  |
|  | | **-** | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah |  | 1 dokumen | 8.524.000 | **-** | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah |  | 1 dokumen | 8,524,000 | |  |
| **5** | | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **149.431.000** | **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **149.431.000** | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  | 40 Paket | 32.150.000 | **-** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya |  | 40 Paket | 32.150.000 | |  |
|  | | **-** | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  | 4 orang | 31.025.000 | **-** | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  | 4 orang | 31.025.000 | |  |
|  | | **-** | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan |  | 5 orang | 72.761.000 | **-** | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan |  | 5 orang | 72.761.000 | |  |
|  | | **-** | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |  | 12 dokumen | 13.495.000 | **-** | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |  | 12 dokumen | 13,495,000 | |  |
| **6** | | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **385.911.120** | **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **585.911.120** | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan |  | 60 dokumen | 7,920,000 | **-** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan |  | 60 dokumen | 7,920,000 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan |  | 4 Paket | 750.000 | **-** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan |  | 4 paket | 750.000 | |  |
|  | | **-** | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD |  | 50 dokumen | 26.000.000 | **-** | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD |  | 50 dokumen | 26,000,000 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan |  | 3 Paket | 7.653.200 | **-** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan |  | 3 paket | 7.653.200 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor | | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan |  | 11 Paket | 2,678.000 | **-** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan |  | 11 Paket | 2,678.000 | |  |
|  | | **-** | | Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |  | 240 Laporan | 328.168.400 | **-** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |  | 240 laporan | 528.168.400 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan |  | 20 Paket | 4.523.520 | **-** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan |  | 20 paket | 4.523.520 | |  |
|  | |  | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu |  | 4 Laporan | 8.200.000 |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu |  | 4 laporan | 8,200,000 | |  |
| **7** | | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | | | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **68.500.000** | **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **122.500.000** | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan |  | 4 unit | 38.500.000 | **-** | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan |  | 6 unit | 62.500.000 | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan |  | 1 unit |  | **-** | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan |  | 1 unit | 30.000.000 | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan |  | 2 unit | 18.000.000 | **-** | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan |  | 2 unit | 18.000.000 | |  |
|  | | **-** | | Pengadaan Mebel | | Jumlah paket mebel yang disediakan |  | 4 unit | 12.000.000 | **-** | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan |  | 5 unit | 12.000.000 | |  |
| **8** | | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **137.921.500** | **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **137.921.500** | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat |  | 1500 Laporan | 7.721.500 | **-** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan Penyediaan Jasa surat menyurat |  | 1500 laporan | 7.721.500 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan |  | 4 Laporan | 74.400.000 | **-** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan |  | 4 laporan | 74.400.000 | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan |  | 4 Laporan | 74.400.000 | **-** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan |  | 4 laporan | 74.400.000 | |  |
| **9** | |  | | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **116.520.000** |  | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **116.520.000** | |  |
|  | | - | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya |  | 10 unit | 58.700.000 | - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya |  | 10 unit | 58.700.000 | |  |
|  | |  | | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |  | 1 unit | 30.000.000 |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |  | 1 unit | 30.000.000 | |  |
|  | |  | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara |  | 54 unit | 27.820.000 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara |  | 45 unit | 27,820,000 | |  |
| **II** | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | | | **Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 10% | 21.677.134.400 | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | **Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 10% | 21.677.134.400 | |  |
| **10** | | **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | | | **Jumlah pasar/sarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)** | **Kab. Luwu Timur** | **5 pasar** | **21.335.420.000** | **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | **Jumlah pasar/sarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)** |  | **1 pasar** | **21,335,420,000** | |  |
|  | | **-** | | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah sarana distribusi perdagangan |  | 5 unit | 21.335.420.000 | **-** | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan |  | 4 unit | 21,335,420,000 | |  |
| **11** | | **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | | | **Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **70%** | **341.714.400** | **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | **Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)** |  | **70%** | **341,714,400** | |  |
|  | | **-** | | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan |  | 1 dokumen | 341.714.400 | **-** | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan |  | 1 dokumen | 341,714,400 | |  |
| **III** | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | | | **Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **7,50%** | **512.823.156** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | **Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **7,80%** | **512,823,156** | |  |
| 12 | | **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **44%** | **485.933.600** | **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | **Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **44%** | **485,933,600** | |  |
|  | | **-** | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan |  | 12 Laporan | 85.485.200 | **-** | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan |  | 12 laporan | 85,485,200 | |  |
|  | | **-** | | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota |  | 11 Laporan | 400.448.400 | **-** | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota |  | 11 laporan | 400,448,400 | |  |
| 13 | | **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **100%** | **26.889.556** | **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)** |  | **100%** | **26,889,556** | |  |
|  | | **-** | | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% |  | 60 laporan | 26.889.556 | **-** | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% |  | 60 laporan | 26,889,556 | |  |
| **IV** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | | | **Persentase peningkatan nilai ekspor (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15% | 304.431.443 | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | **Persentase peningkatan nilai ekspor (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15% | 304,431,443 | |  |
| **14** | | **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase Produk yang memperoleh fasilitasi promosi dagang ('%)** |  | **40%** | **304.431.443** | **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase Produk yang memperoleh fasilitasi promosi dagang ('%)** |  | **40%** | **304,431,443** | |  |
|  | | **-** | | Pemeran Dagang Lokal | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Lokal |  | 5 pelaku usaha | 35.930.000 | **-** | Pemeran Dagang Lokal | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Lokal |  | 5 pelaku usaha | 35,930,000 | |  |
|  | | **-** | | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan |  | 5 pelaku usaha | 79.465.000 | **-** | Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan |  | 5 pelaku usaha | 79,465,000 | |  |
|  | | **-** | | Pameran Dagang Nasional | | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang |  | 5 pelaku usaha | 170.809.918 | **-** | Pameran Dagang Nasional | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang |  | 5 pelaku usaha | 170,809,918 | |  |
|  | | **-** | | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi |  | 5 Produk | 18.226.525 | **-** | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi |  | 5 produk | 18,226,525 | |  |
| **V** | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | | | **Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **5%** | **157.366.100** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | **Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **5%** | **157,336,100** | |  |
| **15** | | **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | | | **Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)** |  | **70%** | **157.366.100** | **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | **Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)** |  | **70%** | **157,336,100** | |  |
|  | | **-** | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang |  | 975 unit | 157.366.100 | **-** | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang |  | 975 unit | 157,336,100 | |  |
| **VI** | | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | | | **Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **14,72%** | **27.668.500** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | **Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **14,72%** | **27.668.500** | |  |
| **16** | | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi** |  | **13,41%** | **27.668.500** | **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi** |  | **13,41%** | **27.668.500** | |  |
|  | | **-** | | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah |  | 59 Unit Usaha | 27.668.500 | **-** | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah |  | 59 Unit Usaha | 27.668.500 | |  |
| **VII** | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | | | **Persentase koperasi yang berkualitas ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **36,13%** | **374.691.600** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | **Persentase koperasi yang berkualitas ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **36,13%** | **374.691.600** | |  |
| **17** | | **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | | | **Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota ('%)** |  | 90,20% | 374.691.600 | **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | **Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)** |  | 90,20% | 374.691.600 | |  |
|  | | **-** | | Pelaksanaan proses Pemeriksaan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan |  | 166 Unit Usahaa | 374.691.600 | **-** | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan |  | 166 Unit Usahaa | 374.691.600 | |  |
| **VIII** | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | | | **Persentase koperasi sehat ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **35,75%** | **79.093.100** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | **Persentase koperasi sehat ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **35,75%** | **79.093.100** | |  |
| **18** | | **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya** |  | **55,81%** | **79.093.100** | **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya** |  | **55,81%** | **79.093.100** | |  |
|  | | **-** | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan |  | 15 Unit Usaha | 79.093.100 | **-** | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan |  | 15 unit usaha | 79.093.100 | |  |
| **IX** | |  | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | | **Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan** | **Kab. Luwu Timur** | **15,61%** | **216.065.500** |  | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan** | **Kab. Luwu Timur** | **15,61%** | **216.065.500** | |  |
| **19** | | **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota** |  | **40,93%** | **216.065.500** | **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota** |  | **40,93%** | **216.065.500** | |  |
|  | | **-** | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian |  | 15 orang | 216.065.500 | **-** | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian |  | 15 orang | 216.065.500 | |  |
| **X** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | | | **Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, Koperasi** | **Kab. Luwu Timur** | **6,75%** | **37.323.500** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | **Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, Koperasi** | **Kab. Luwu Timur** | **6,75%** | **37.323.500** | |  |
| **20** | | **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan srukturisasi usaha** |  | **6,75%** | **37.323.500** | **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan srukturisasi usaha** |  | **6,75%** | **37.323.500** | |  |
|  | | **-** | | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi |  | 20 unit usaha | 37.323.500 | **-** | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi |  | 20 unit usaha | 37.323.500 | |  |
| **XI** | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | | | **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **55%** | **580.404.000** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **55%** | **580.404.000** | |  |
| **21** | | **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | | | **Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)** |  | 145 WUB | 580.404.000 | **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | **Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)** |  | 145 WUB | 580.404.000 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro |  | 100 Orang | 46.225.000 | **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro |  | 100 orang | 46,225,000 | |  |
|  | | **-** | | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro |  | 70 Unit Usaha | 24.577.000 | **-** | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro |  | 70 unit usaha | 24,577,000 | |  |
|  | | **-** | | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | Jumlah unit usaha mikro yang terdata |  | 270 unit usaha | 64.222.000 | **-** | Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha mikro yang terdata |  | 270 unit usaha | 64,222,000 | |  |
|  | | **-** | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro |  | 95 unit usaha | 405.502.000 | **-** | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro |  | 95 unit usaha | 405.502.000 | |  |
|  | | **-** | | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | Jumlah usaha mikro yang yang telah mendapatkan perizinan |  | 40 unit usaha | 39.878.000 | **-** | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang yang telah mendapatkan perizinan |  | 40 unit usaha | 39,878,000 | |  |
| **XII** | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | | | **Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **6,36%** | **308.901.000** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | **Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **6,36%** | **458.901.000** | |  |
| **22** | | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | | | Persentase Rasio pertumbuhan skala usaha mikro (%) |  | 8,30% | 308.901.000 | **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | Persentase peningkatan skala usaha mikro (%) |  | 8,30% | 458.901.000 | |  |
|  | | **-** | | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi |  | 19 unit usaha | 308.901.000 | **-** | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi |  | 19 unit usaha | 458.901.000 | |  |
| **XIII** | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | | | **Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan** | **Kab. Luwu Timur** | **0 dokumen** | **909.325.800** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | **Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan** | **Kab. Luwu Timur** | 0 dokumen | **909.325.800** | |  |
| **23** | | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | | | **Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi** |  | **0 dokumen** | **909.325.800** | **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | **Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi** |  | **0 dokumen** | **909.325.800** | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri |  | 1 dokumen | 457.714.300 | **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri |  | 1 Dokumen | 457,714,300 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |  | 1 dokumen | 61.611.500 | **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |  | 1 Dokumen | 61.611.500 | |  |
|  | | **-** | | Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri | | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri |  | 1 dokumen | 390.000.000 | **-** | Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri |  | 1 dokumen | 390.000.000 | |  |
| **XIV** | | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | | | **Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** | **Kab. Luwu Timur** | 92,30% | 39.640.000 | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | **Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** | **Kab. Luwu Timur** | 92,30% | 39.640.000 | |  |
| **24** | | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase Izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** |  | 59,09% | 39.640.000 | **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | **Persentase Izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** |  | 59,09% | 39.640.000 | |  |
|  | | **-** | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 1 dokumen | 39.640.000 | **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 1 Dokumen | 39.640.000 | |  |
| **XV** | |  | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | **Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelolah sesuai standar** |  | **15%** | **96.455.000** |  | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Persentase pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelolah sesuai standar** |  | **15%** | **96.455.000** | |  |
| **25** | | **Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI, Kewenangan Kabupaten/Kota** | | | | **Persentase usaha industri yang terkelolah dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)** |  | **56,25%** | **96.455.000** |  | **Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI, Kewenangan Kabupaten/Kota** | **Persentase usaha industri yang terkelolah dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)** |  | **56,25%** | **96.455.000** | |  |
|  | | **-** | | Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas | | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas |  | 1 Dokumen | 35.000.000 |  | Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas |  | 1 Dokumen | 35.000.000 | |  |
|  | | **-** | | Fasilitasi pengumpulan ,pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) | | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) |  | 1 Dokumen | 61.455.000 | **-** | Fasilitasi pengumpulan ,pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) | Jumlahdokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas) |  | 1 Dokumen | 61.455.000 | |  |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | | | | | **30.140.567.596** | **JUMLAH TOTAL** | | | | | **30,594,567,596** | |  |

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal untuk pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan masyarakat, stageholder bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai mitra kerja dinas dalam mewujudkan visi Kabupaten Luwu Timur yakni Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya.

Urusan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan tahun 2025 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya :

1. Urusan wajib (Koperasi dan UKM)

- Usulan stakeholder bidang UMKM melalui program dan kegiatan prioritas berdasarkan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Urusan pilihan (perdagangan dan perindustrian)

- Usulan stakeholder/musrembang bidang perdagangan dan bidang perindustrian melaluiprogram dan kegiatan prioritas berdasarkan usulan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel. 2.5** | | | | | |
| (Tabel T-C. 32, Lampioran Permendagri 86 Tahun 2017) | | | | | |
| Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  Kabupaten Luwu Timur | | | | | |
| **Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | | |
| **No** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Besaran/**  **Volume** | **Catatan** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **A** | **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** |  | **Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)** |  |  |
| 1 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Desa Baruga Kecamatan Malili | Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar) | 1 Paket | Lanjutan Pembuatan Kanopi Pasar Malili Kec. Malili |
| 2 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni | Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar) | 1 Paket | Lanjutan Pembangunan Gudang Pasar Tomoni Kec. Tomoni |
| 3 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Desa Sumber Makmur Kecamatan Kalaena | Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar) | 1 Paket | Pembangunan Kios Pasar Sumber Makmur Kec. Kalaena |
| 4 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu | Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar) | 1 Paket | Pembangunan Lapak Pasar Pepuro Barat Kec. Wotu |
| 5 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana | Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar) | 1 Paket | Pembangunan Pasar Wonorejo Kec. Mangkutana |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Propinsi**

7 Agenda pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Membangun budaya dan karakter bangsa.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup :

1. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

**3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025**

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2021, dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 yaitu ***“Peningkatan Produktifitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***

Olehnya itu sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 6 (enam) Prioritas Pembangunan yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang diserta peningkatan decent job;
4. Pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan pengiatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Arah kebijakan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

1. Pendataan lengkap UMKM disektor non pertanian dalam rangka mendoorng terwujudnya system informasi yang terintegrasi untuk mengotomisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data koperasi dan UMKM;
2. Major project pengelolaan terpadu UMKM sebagai penanggulangan pengangguran dan pemulihan dunia usaha melalui pengembangan rumah produksi bersama/*Factory sharing* dengan target 5 *pilot project* melalui penyediaan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan dimasing-masing lokasi yang terpilih.
3. Mendukung terciptanya koperasi modern melalui: (1) korporatisasi petani dan nelayan untuk mencapai skala ekonomi dan memberikan *value added* tinggi melalui model bisnis yang berorientasi industri (2) pengembangan sistem pengawasan terhadap koperasi bermasalah berdasarkan tata kelola, profil resiko,kinerja keuangan dan permodalan, (3) penguatan regulasi melalui revisi RUU Perkoperasian;
4. Pengembangan PLUT-UMKM, merupakan rumah bagi UMKM untuk belajar mendapatkan akses terhadap informasi, pasar maupun pembiayaan
5. Redesign PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM) –KUMKM untuk mendorong tata kelola PLUT-KUMKM yang diperkuat untuk pengembangan koperasi, UMKM, wirausaha dalam memajukan potensi unggulan daerah melalui: (1) penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan usaha, (2) pusat pengembangan produk unggulan daerah, (3) fasilitasi pendaftaran dan perizinan UMKM, (4) peningkatan sinergi dengan mitra strategis, (5) penyediaan *Market Place* dan *Public Space;*
6. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penguatan koperasi dan UMKM serta penciptaan lapangan kerja melalui penumbuhan wirausaha dengan fasilitasi akses pembiayaan melalui bantuan permodalan bagi pelaku usaha mikro dan pendampingan sertfikasi produk usaha mikro, akses pasar melalui revitalisasi pasar rakyat, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem.;
7. Pengembangan kewirausahaan nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pemula dan mapan;
8. Pengembangan rumah kemasan sebagai upaya meningkatkan kualitas mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan;

Urusan Perdagangan

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan :

1. Kestabilan harga dan keteresediaan barang kebutuhan pokok untuk perdagangan dalam negeri;
2. Pengembangan pasar baru dengan prioritas di pasar non tradisional melaui perkuatan logistik nasional, pemanfaatan teknologi digital, menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen;
3. Meningkatkan produk ekspor manufaktur dan partisipasi dala rantai nilai gobal (global value chain)

Urusan Perindustrian

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian:

1. Industri 4.0, resolusi industri 4,0 merupakan strategi mempercepat pencapaian target pengembangan industri dengan penguatan rantai nilaiuntuk industri bahan baku/hulu, pengolahan/antara serta produk siap konsumsi/hilir, pengembangan wilayah industri, pengembangan jaringan pasar serta pengembangan kapasitas tenaga kerja;
2. Aspirasi making Indonesia 4,0 melalui peningkatan daya saing dengan target 5% porsi ekspor netto terhadap PDB, meningkatan rasio produktifitas tenaga kerja, meningkatkan pengeluaran litbang nasional hingga 4,82% dari PDB

**3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026, sebagai berikut :

**3.2.1 Tujuan :**

1. Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor industri danUMKM
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah

**3.2.2 Sasaran :**

1. Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting,dengan indikator :

* Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun

2. Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM dengan indikator :

- Pertumbuhan nilai produksi UMKM

- Pertumbuhan nilai produksi IKM

- Persentase Koperasi Aktif

- Pertumbuhan sub sektor perdagangan

3. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah, dengan indikator :

- Persentase capaian kinerja program perangkat daerah

**Tabel.5**

**Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan, Koperasi**

**Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Target Kinerja** |
| 1. | Meningkatkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat | Pengeluaran/Kapita | Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang Tahun | 98% |
| 2. | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor UMKM | % UMKM yang naik kategori | Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM | * Pertumbuhan nilai produksi UMKM * Pertumbuhan nilai produksi IKM * % Koperasi aktif * Pertumbuhan sub sektor perdagangan | 10,29%  0,15%  80,00%  12,50% |
| 3. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah |  | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase capaian kinerja program perangkat daerah | 98% |

**3.3** **Program dan Kegiatan**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya serta mengakomodir usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah direncanakan, maka pada tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur merencanakan 15 program dengan 24 kegiatan dan 57 sub.kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

* + 1. **Program Utama**

1. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**

* **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**
* Sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan
* **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**
* Sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

1. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

* **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**
* Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
* Sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
* **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
* Sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

**3. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**

* **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
* Sub kegiatan Pemeran Dagang Nasional
* Sub kegiatan Pameran Dagang Lokal
* Sub kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekkspor Unggulan
* Sub kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor

**4. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

* **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
* Sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

**5.** **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**

* **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
* Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

**6**. **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**

* **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
* Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

7. **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**

* **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
* Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

**8. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**

* **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
* Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

**9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**

* **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
* Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

**10.** **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**

* **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**
* Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
* Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
* Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
* Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
* Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
* Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

11. **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**

* **Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**
* Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

12. **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

**- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**

* Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
* Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
* Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

13. **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**

- **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

**14. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

**- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Pemantauan dan Evaluasi Kebutuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas

**15**. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

* **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
* Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
* Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
* Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
* **KegiatanAdministrasi Keuangan Perangkat Daerah**
* Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
* Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
* **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
* Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
* **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
* Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
* **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
* Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
* Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
* Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
* Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
* **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
* Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
* Penyediaan Bahan Logistik Kantor
* Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
* Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
* Fasilitasi Kunjungan Tamu
* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
* Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
* **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
* Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendandaraan Dinas Jabatan
* Pengadaan mebel
* Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
* Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
* **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
* Penyediaan Jasa Surat Menyurat
* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
* **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
* Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merencanakan 15 program dan 24 kegiatan dan 57 sub.kegiatan dengan pagu indikatif Rp.30.140.567.596. Alokasi Program, kegiatan dan sub.kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program/ Kegiatan/**  **Sub Kegiatan** | | **Indikator Kinerja** | **Rencana Kerja tahun 2025** | | |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | | **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar** |  | **98%** | **4.819.244.497** |
| **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **86.031.800** |
| **-** | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah |  | 10 laporan | 33.881.300 |
| **-** | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  | 2 dokumen | 3,112,300 |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 3 dokumen | 45.928.200 |
| **-** | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |  | 2 dokumen | 3,110,000 |
| **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **3,830,880,077** |
| **-** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD |  | 18 laporan | 115,521,800 |
| **-** | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerimah gaji dan tunjangan |  | 28 orang/bulan | 3.715.358.277 |
| **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | | **Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **35.525.000** |
| **-** | Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD |  | 2 laporan | 35.525.000 |
| **Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** | | **Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **8,524,000** |
| **-** | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah |  | 1 dokumen | 8,524,000 |
| **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **149.431.000** |
| **-** | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya |  | 40 paket | 32.150.000 |
| **-** | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |  | 4 orang | 31.025.000 |
| **-** | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 5 orang | 72.761.000 |
| **-** | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian |  | 12 dokumen | 13,495,000 |
| **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **385.911.120** |
| **-** | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan |  | 60 dokumen | 7,920,000 |
| **-** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan |  | 4 paket | 750.000 |
| **-** | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD |  | 50 dokumen | 26,000,000 |
| **-** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan |  | 3 paket | 7.653.200 |
| **-** | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/  Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket komponen instalasi listrik/  penerangan bangunan kantor yang di sediakan |  | 11 Paket | 2,678,400 |
| **-** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD |  | 240 laporan | 328.186.400 |
| **-** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan |  | 20 paket | 4.523.520 |
|  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu |  | 4 laporan | 8,200,000 |
| **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **68.500.000** |
| **-** | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan |  | 1 unit |  |
| **-** | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan |  | 4 unit | 38.500.000 |
| **-** | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan |  | 2 unit | 18.000.000 |
| **-** | Pengadaan Mebel | Jumlah paket mebel yang disediakan |  | 4 unit | 12.000.000 |
| **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ('%)** | **DISDAGKOPRINUM** | **100%** | **137.921.500** |
| **-** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat |  | 1500 laporan | 7.721.500 |
| **-** | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan penyediaan jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan |  | 4 laporan | 55,800,000 |
| **-** | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan |  | 4 laporan | 74,400,000 |
|  | **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik ('%)** | **DISDAGKOP-UKM** | **100%** | **116,520,000** |
| - | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya |  | 10 unit | 58.700.000 |
|  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi |  | 1 unit | 30,000,000 |
|  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara |  | 54 unit | 27,820,000 |
| **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | | **Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/ direvitalisasi (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **10%** | **21,677,134,400** |
| **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** | | **Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan (Pasar)** |  | **5 pasar** | **21,335,420,000** |
| **-** | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah sarana distribusi perdagangan |  | 5 unit | 21,355,420,000 |
| **Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya** | | **Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan ('%)** |  | **70%** | **341,714,400** |
| **-** | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelolah sarana distribusi perdagangan |  | 1 dokumen | 341,714,400 |
| **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | | **Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **7,50%** | **512,823,156** |
| **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** | | **Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **44%** | **485,933,600** |
| **-** | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan |  | 12 laporan | 85,485,200 |
| **-** | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang bedampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota |  | 11 laporan | 400,448,400 |
| **Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase kinerja pengawasan penyakuran pupuk bersubsidi dan pestisida ('%)** |  | **100%** | **26,889,556** |
| **-** | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah laporan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% |  | 60 laporan | 26,889,556 |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | | **Persentase peningkatan nilai ekspor (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 15% | 304,431,443 |
| **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang ('%)** |  | **40%** | **304,431,443** |
| **-** | Pameran Dagang Nasional | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang |  | 5 pelaku usaha | 170,809,918 |
| **-** | Pameran Dagang Lokal | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal |  | 5 pelaku usaha | 35,930,000 |
| **-** | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan |  | 5 pelaku usaha | 79,465,000 |
| **-** | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi |  | 5 produk | 18,226,525 |
| **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | | **Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTTP (%)** | **Kab. Luwu Timur** | 5% | 157,366,100 |
| **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** | | **Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi (%)** |  | **70%** | **157,366,100** |
| **-** | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah alat ukur, takar, timbang dan alat perlengkapan yang ditera ulang |  | 975 unit | 157,366,100 |
| **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | | **Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam (%)** | **Kab. Luwu Timur** | **14,72%** | **27.668.500** |
| **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi ('%)** |  | **13,41%** | **27.668.500** |
| **-** | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pimjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota |  | 59 unit usaha | 27.668.500 |
| **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | | **Persentase koperasi yang berkualitas ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **36,13%** | **374.691.600** |
| **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | | **Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota ('%)** |  | 90,20% | 374.691.600 |
| **-** | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan |  | 166 unit usaha | 374.691.600 |
| **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | | **Persentase koperasi sehat ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **35,75%** | **79.093.100** |
| **Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ('%)** |  | **55,81%** | **79.093.100** |
| **-** | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan |  | 15 unit usaha | 79.093.100 |
|  | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **15,61%** | **216.065.500** |
| **Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/ kota ('%)** |  | **40,93%** | **216.065.500** |
| **-** | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian |  | 15 orang | 216.065.500 |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | | **Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, koperasi ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **6,75%** | **37.323.500** |
| **Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | | **Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha ('%)** |  | **6,75%** | **37.323.500** |
| **-** | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Koperasi) |  | 20 unit usaha | 37.323.500 |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | | **Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **55%** | **580.404.000** |
| **Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | | **Jumlah wirausaha baru berskala mikro (WUB)** |  | **145 WUB** | **580.404.000** |
| **-** | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro |  | 70 unit usaha | 24,577,000 |
| **-** | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan |  | 40 unit usaha | 39,878,000 |
| **-** | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang telah menerimah pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro |  | 95 unit usaha | 405.502.000 |
| **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro |  | 100 orang | 46,225,000 |
| **-** | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah unit usaha yang terdata |  | 270 unit usaha | 64,222,000 |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | | **Rasio pertumbuhan skala usaha mikro ('%)** | **Kab. Luwu Timur** | **6,36%** | **308.901.000** |
| **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | | **Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)** |  | **8,30%** | **308.901.000** |
| **-** | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi |  | 19 unit usahal | 308.901.000 |
| **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | | **Jumlah peraturan Bupati (perbub) yang ditetapkan** | **Kab. Luwu Timur** | **1 dokumen** | **909.325.800** |
| **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** | | **Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi** |  | **1 dokumen** | **909.325.800** |
| **-** | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri |  | 1 dokumen | 390.000.000 |
| **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri |  | 1 dokumen | 457,714,300 |
| **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat |  | 1 dokumen | 61,611,500 |
| **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | | **Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali** | **Kab. Luwu Timur** | **92,30%** | **39.640.000** |
| **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** | | **Persentase Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah yang terkendali** |  | **59,09%** | **39.640.000** |
| **-** | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten/kota |  | 1 dokumen | 39,640,000 |
| **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | | **Persentase Pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelola sesuai standar** | **Kab. Luwu Timur** | **15%** | **96.455.000** |
| **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** | | **Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional (SIINas)** |  | **56,25%** | **96.455.000** |
| **-** | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |  | 1 dokumen | 61,455,000 |
| **-** | Pemantauan dan Evaluasi Kepatutan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas | Jumlah Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten/kota dalam penyampaian data ke SIINas |  | 1 dokumen | 30,000,000 |
| **JUMLAH TOTAL** | | | | | **30,140,567,596** |

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2025 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertical sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Pada tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur telah merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 15 program, 24 kegiatan dan 57 sub.kegiatan. Perencanaan memang bukan segala-galanya , tetapi tanpa proses perencanaan yang baik maka pelaksanaan program dan kegiatan tidak akan berjalan baik. Dengan disusunnya dokumen Renja OPD ini diharapkan perencanaan program ,kegiatan dan sub.kegiatan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat lebih matang, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu member kontribusi terhadap capaian target pembangunan kabupaten Luwu Timur.

Renja Tahun 2025 adalah pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Revisi 2021-2026.

Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Semoga RENJA Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2025 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Malili, Juni 2024

**KEPALA DINAS,**

**SENFRY OKTOVIANUS, S.STP, MPA**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP:19751001 199612 1 001